

ABSTRAK

Nopiyana (01656210094)

“PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TUMPANG TINDIH DI KANTOR PERTANAHAN DENPASAR (STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 33/PK/2015/PTUN.DPS)”

(v + 107 halaman; 3 lampiran)

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang diakui serta dikeluarkan oleh instansi pertanahan. Untuk mendapatkan sertipikat maka pemegang hak atas tanah harus melakukan proses pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pendaftaran tanah mempunyai tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan masih sering melakukan kesalahan salah satunya ketidakcermatan/ketelitian pada saat pemetaan atau pengukuran bidang tanah. Kesalahan tersebut mengakibatkan terbitnya lebih dari satu sertipikat dalam satu bidang tanah yang dapat disebut sebagai tumpang tindih. Bagaimana perlindungan hukum serta bagaimana tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan atas permasalahan tumpang tindih sertipikat hak milik yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Tanah yang telah diterbitkan sertipikat diterbitkan kembali sertipikat yang lain oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pihak yang merasa dirugikan dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dapat mengajukan upaya-upaya hukum agar mendapatkan perlindungan hukum.

Referensi: 25 (1987-2012)

Kata Kunci : Perlindungan hukum, tumpang tindih, sertipikat.

ABSTRACT

Nopiyana (01656210094)

“LEGAL PROTECTION FOR OVERLAPPING PROPERTY RIGHTS CERTIFICATE HOLDERS AT THE DENPASAR LAND OFFICE (CASE STUDY CASE NUMBER: 33/PK/2015/PTUN.DPS)” (xxx + xx pages; x attachment).

(v + 107 pages; 3 attachment)

A certificate is a proof of title that is recognized and issued by a land agency. To obtain a certificate, the land rights holder must carry out the land registration process first. Land registration aims to provide legal certainty and legal protection for land rights holders. In practice, the land registration process carried out by the Head of the Land Office still often makes mistakes, one of which is inaccuracy when mapping or measuring land plots. This error resulted in the issuance of more than one certificate in one plot of land which could be said to be overlapping. What is the legal protection and what is the responsibility of the Head of the Land Office for the problem of overlapping title certificates that occur? The research was conducted using normative juridical research methods and using statutory, case and conceptual approaches. Land for which a certificate has been issued will be reissued with another certificate by the Head of the Land Office. Parties who feel disadvantaged by legal products issued by the Head of the Land Office can submit legal measures to obtain legal protection.

References : 25 (1987-2012)

Keywords : Legal protection, overlapping, certificate.